

**PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN OPINI AUDIT
TERHADAP TINGKAT KORUPSI
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022)**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana (S1)

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

VIKA ARTHA NUGRAINI

31402100252

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN OPINI AUDIT TERHADAP
TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022)**

Disusun Oleh:

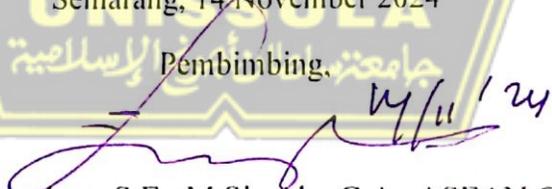
Vika Artha Nugraini

Nim: 31402100252

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya
Dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan penelitian skripsi
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 14 November 2024

Pembimbing,


Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP

NIK. 211492003

HALAMAN PERSETUJUAN

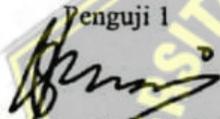
PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN OPINI AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022)

**Disusun Oleh:
Vika Artha Nugraini
NIM. 31402100252**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 22 November 2024

Susunan Dewan Penguji

Penguji 1



Dr. Rustam Hanafi, S.E., M.Sc., Ak., CA
NIK. 211403011

Penguji 2



Drs. Osmad Mutaher, M.Si., Ak
NIK.210403050

Bembimbing,


Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP
NIK.211492003

Penelitian untuk Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Tanggal 22 November 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : VIKA ARTHA NUGRAINI

Nim : 31402100252

Fakultas : EKONOMI

Program Studi : SI AKUNTANSI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan penelitian skripsi berjudul **“Pengaruh Temuan Audit dan Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam usulan penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 24 November 2024



Vika Artha Nugraini
NIM. 31402100252

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIKI ARTHA NUGRAINI

NIM : 31402100252

Program Studi : SI AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

“PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN OPINI AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020-2022)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 November 2024



(VIKI ARTHA NUGRAINI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Melamban bukanlah hal yang tabu, karena setiap manusia memiliki proses yang berbeda. Terus melangkah dan selalu mengingatNya”

(Vika Artha Nugraini)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

Diri saya sendiri yang telah berjuang dan mampu menyelesaikan skripsi ini, juga untuk kedua orang tua serta orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, cinta kasih, serta rasa semangat di setiap langkah yang penulis jalani hingga skripsi ini bisa tersusun hingga selesai. Semoga kebaikan dan kebahagiaan serta lindungan dari Allah SWT selalu membersamainya selalu. Aamiin.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Temuan Audit Dan Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan data sekunder. Populasi dan sampel yang digunakan adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia yang memiliki Temuan dan Opini Audit atas korupsi sebanyak 32 Provinsi dari tahun 2020-2021, sehingga total data yang di analisis sebanyak 96 data. Pengambilan dilakukan dengan *purposive sampling* dan teknik analisis penelitian menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Hipotesis yang menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 22. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Temuan Audit berpengaruh positif signifikan dan Opini Audit negatif tidak signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia pada tahun 2020-2022.

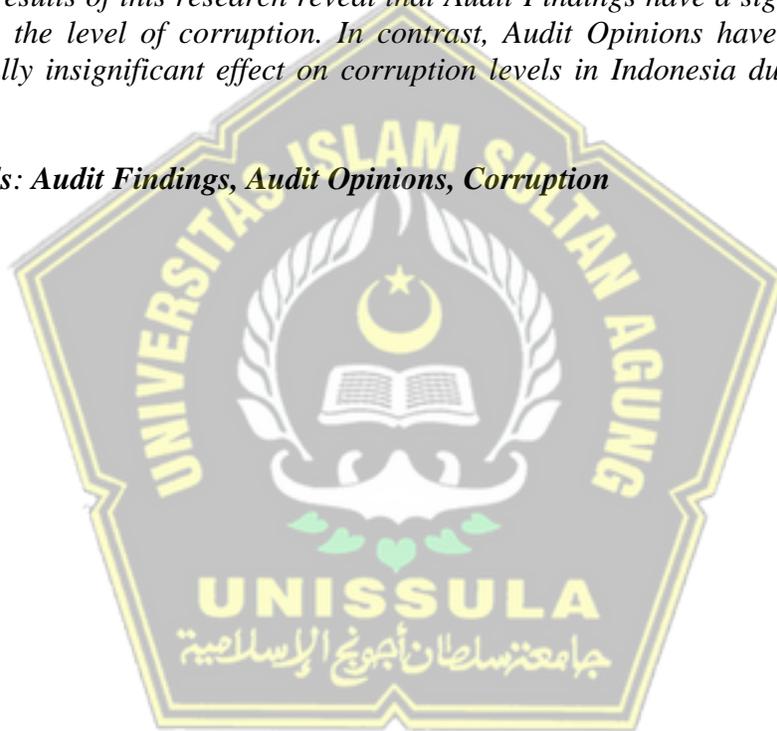
Kata kunci: Temuan Audit, Opini Audit, Korupsi



ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the effect of Audit Findings and Audit Opinions on the level of corruption in provincial governments. The research employs a quantitative approach using secondary data. The population and sample consist of 32 provincial governments in Indonesia that reported Audit Findings and Audit Opinions related to corruption during 2020-2022 years, resulting in a total of 96 data. The sampling method utilized is purposive sampling, while the data analysis techniques include Descriptive Statistics, Classical Assumption Tests, Multiple Linear Regression Analysis, and Hypothesis Testing, all conducted using IBM SPSS version 22. The results of this research reveal that Audit Findings have a significant positive effect on the level of corruption. In contrast, Audit Opinions have a negative but statistically insignificant effect on corruption levels in Indonesia during 2020-2022 years.

Keywords: *Audit Findings, Audit Opinions, Corruption*



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Temuan Audit dan Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022)”. Penyusunan usulan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi Sarjana (S1) dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistiyo, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang,
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., Ph.D., IFP., AWP, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Sri Dewi Wahyundaru, SE., M.Si., Ak., CA., ASEANCPA., CRP selaku dosen pembimbing yang selalu sabra memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga usulan penelitian skripsi ini dapat terselesaikan,
4. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan usulan penelitian skripsi ini,
5. Responden yang telah memberikan data serta informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian ini yang sangat berarti bagi kelengkapan dan kedalaman analisis penelitian ini,

6. Kedua Orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan mental dan spiritual yang tiada hentinya dan sangat berharga bagi penulis.
7. Kepada sahabat dekat yang saya sayangi dan cintai yang selalu setia menemani dan memberi motivasi dorongan untuk terus semangat serta mendengarkan keluh kesah dari penulis,
8. Teman-teman seperjuangan jurusan S1 Akuntansi dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian usulan penelitian skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan usulan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar penyusunan penelitian ini lebih sempurna. Besar harapan penulis agar penulis ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis kepada semua pembaca.

Semarang, 14 November 2024

Penyusun



Vika Artha Nugraini
NIM: 31402100252

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. <i>Grand Theory</i>	9
2.1.1. <i>Fraud Triangel</i>	9

2.2.	Variabel Penelitian.....	11
2.2.1.	Korupsi.....	11
2.2.2.	Temuan Audit.....	12
2.2.3.	Opini Audit.....	13
2.3.	Penelitian Terdahulu.....	15
2.4.	Kerangka Penelitian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	16
2.4.1.	Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi.....	16
2.4.2.	Pengaruh Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi.....	17
2.5.	Kerangka Penelitian.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....		20
3.1.	Jenis Penelitian.....	20
3.2.	Populasi dan Sampel.....	20
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	21
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	22
3.5.	Variabel dan Definisi Operasional.....	22
3.5.1.	Variabel Independen Temuan Audit (X1).....	23
3.5.2.	Variabel Independen Opini Audit (X2).....	23
3.5.3.	Variabel Dependen Tingkat Korupsi (Y).....	23

3.6.	Metode Analisis Data	26
3.6.1.	Statistik Deskriptif	26
3.6.2.	Uji Asumsi Klasik	26
3.6.2.1.	Uji Normalitas.....	27
3.6.2.2.	Uji Multikolinearitas.....	27
3.6.2.3.	Uji Heteroskedastisitas	28
3.6.2.4.	Uji Autokorelasi.....	28
3.6.3.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	29
3.6.4.	Uji Hipotesis	30
3.6.4.1.	Uji t Parsial	30
3.6.4.2.	Uji F Simultan.....	31
3.6.4.3.	Koefisien Determinasi (R^2).....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		33
4.1	Deskripsi Sampel Penelitian.....	33
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	33
4.3	Uji Asumsi Klasik	35
4.3.1	Uji Normalitas.....	35
4.3.2	Uji Multikolinearitas	36

4.3.3	Uji Heterokedastisitas.....	37
4.3.4	Uji Autokorelasi	37
4.4	Analisis Regresi Linear Berganda	38
4.5	Uji Hipotesis Parsial (Uji t).....	39
4.6	Uji F Simultan	40
4.7	Uji Koefisien Determinasi.....	41
4.8	Pembahasan Hasil Analisis Penelitian.....	41
4.8.1	Pengaruh Temuan Audit terhadap Korupsi di Indonesia.....	41
4.8.2	Pengaruh Opini Audit terhadap Korupsi di Indonesia	43
BAB V PENUTUP.....		45
5.1	Kesimpulan.....	45
5.2	Saran.....	45
5.3	Keterbatasan	46
DAFTAR PUSTAKA.....		47
LAMPIRAN.....		51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Korupsi Tahun 2019 Di Indonesia.....	2
Gambar 2 Tren Korupsi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022	4
Gambar 3 Kerangka Pemikiran.....	19



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3. 1 Sampel yang memenuhi kualifikasi	21
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel	24
Tabel 4. 1 Proses Pengambilan Sampel Penelitian Tahun 2020-2022	33
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	34
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas.....	35
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	36
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heterokedastisitas	37
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi.....	37
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	38
Tabel 4. 8 Hasil Uji t Parsial	39
Tabel 4. 9 Hasil Uji F Simultan.....	40
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Sampel Pemerintah Provinsi Indonesia Tahun 2020-2022	51
Lampiran 2 Tabulasi Data	52
Lampiran 3 Temuan Audit Tahun 2020-2022	55
Lampiran 4 Korupsi Pemerintah Provinsi Indonesia Tahun 2020-2022	57
Lampiran 5 Jumlah LKPD Provinsi di Indonesia	59
Lampiran 6 APBD Pemerintah Provinsi Tahun 2020-2022	60
Lampiran 7 Opini Audit Tahun 2020-2022	62
Lampiran 8 Analisis Statistik Deskriptif	76
Lampiran 9 Uji Normalitas	76
Lampiran 10 Uji Multikolinearitas	76
Lampiran 11 Uji Heterokedastisitas	77
Lampiran 12 Uji Autokorelasi	77
Lampiran 13 Analisis Regresi Linear Berganda	77
Lampiran 14 Uji t Parsial	78
Lampiran 15 Uji F Simultan	78
Lampiran 16 Uji Koefisien Determinasi	78
Lampiran 17 Tabel Uji t Parsial	79
Lampiran 18 Tabel Uji F Simultan	80
Lampiran 19 Tabel Durbin-Watson	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia telah lama menghadapi berbagai tantangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi, terutama dalam sektor ekonomi dan lembaga keuangan yang berupaya mengelola risiko dengan efektif. Kondisi ini tidak hanya berpotensi mengancam stabilitas keuangan organisasi atau instansi pemerintah, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Salah satu risiko utama yang sering terjadi adalah kejahatan finansial, yang dikenal sebagai fraud. Fraud mengacu pada aktivitas yang melibatkan manipulasi atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal, sehingga merugikan pihak lain. Pelaku fraud biasanya melakukan tindakan seperti penipuan, penggelapan, pencurian informasi, dan manipulasi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), fraud didefinisikan sebagai segala bentuk penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Fraud terbagi menjadi tiga kategori utama: kecurangan pelaporan (*fraudulent statements*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*). Salah satu bentuk fraud adalah korupsi. ACFE mengelompokkan korupsi ke dalam empat jenis, yaitu *Conflict of Interest* (benturan kepentingan), *Bribery* (penyuapan), *Illegal Gratuities* (pemberian hadiah dengan maksud suap), dan *Economic Extortion* (pemerasan). Korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dari fraud secara umum, dan

bukti bahwa kerugian terbesar di Indonesia berasal dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan survei ACFE, persentase kasus korupsi di Indonesia mencapai 70% pada tahun 2019 (ACFE, 2020).

Gambar 1
Persentase Korupsi Tahun 2019 Di Indonesia



Sumber: ACFE 2019

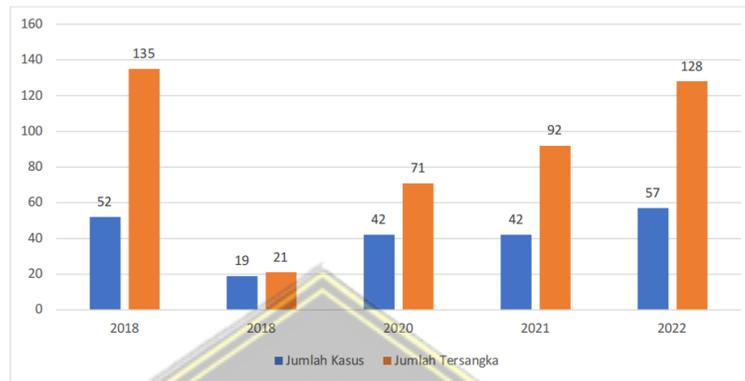
Korupsi sering kali merugikan berbagai pihak dengan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang didapatkan dengan cara tidak sah atau illegal. Berdasarkan hasil survei dari *Transparency International* atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2022. Skor IPK turun sebesar empat poin, dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34. IPK ini dihitung oleh *Transparency Internasional* menggunakan skala 0-100. Angka 0 menunjukkan tingkat korupsi tertinggi, sedangkan 100 mencerminkan tingkat integritas yang paling bersih. Dari total 180 negara yang dinilai, Indonesia menempati peringkat ke-110 pada tahun 2022, yang menjadi catatan

terburuk sejak era reformasi. Korupsi ini berdampak serius, termasuk menghambat pembangunan ekonomi, merusak sistem hukum dan peradilan, serta memperburuk kualitas pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yaitu, menyebutkan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi (BPK RI, 2007). Terlebih dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada kepala daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan termasuk urusan keuangan (BPK RI, 2004b). Dengan adanya desentralisasi ini, maka pengelolaan keuangan tingkat daerah dapat berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pemerintah daerah di Indonesia cenderung memberikan celah untuk melakukan korupsi, hal ini dapat dilihat pada laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022 oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), menyebutkan bahwa kasus korupsi sepanjang tahun 2022 paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur, dimana penegak hukum berhasil mengungkapkan sebanyak 57 kasus dan 128 orang ditetapkan sebagai tersangka, serta kerugian yang dihasilkan sebesar Rp54.017.332.070. Provinsi Jawa Timur juga secara konsisten dalam lima tahun terakhir masih menjadi provinsi dengan tingkat kasus korupsi yang tinggi.

Gambar 2
Tren Korupsi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022



Sumber: ICW 2022

Terjadinya korupsi pada Provinsi Jawa Timur seharusnya menjadi indikasi bahwa pemerintah daerah setempat perlu melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan anggaran dalam rangka pencegahan korupsi. Hal ini juga berlaku untuk pemerintah daerah di Indonesia lainnya agar tidak menimbulkan kerugian yang besar, karena selain pada Provinsi Jawa Timur, ICW juga mengungkapkan kasus korupsi pada Povinsi Jawa Barat yang terdapat 33 kasus korupsi, Nusa Tenggara Timur terdapat 30 kasus korupsi, Aceh terdapat 28 kasus korupsi, dan Sumara Selatan dengan 28 kasus korupsi (ICW, 2023).

Tidak hanya pengelolaan anggaran saja yang perlu dioptimalkan, faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi seperti temuan audit, juga harus dilakukan secara teliti dan professional dalam penyelidikan berbagai dokumen, transaksi, proses, ataupun aktivitas yang terkait dengan dugaan tindakan korupsi. Temuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi tindakan korupsi dan mengumpulkan bukti yang mendukung

sehingga dapat memastikan akuntabilitas dalam menghadapi kasus korupsi tersebut. menurut SPKN, temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi awal kecurangan disajikan dalam LHP tanpa menjelaskan secara mendetail dugaan kecurangan tersebut. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi tingkat korupsi pada pemerintah daerah yaitu, adanya opini audit (Maria & Halim, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa opini merupakan pernyataan professional keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kecukupan pengungkapan (BPK RI, 2003).

BPK menyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Artinya pemberian opini BPK dilakukan sesuai proses yang berlaku dan dilakukan secara profesional. Sedangkan berdasarkan UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa yang dimaksud opini audit adalah pendapat ahli yang memeriksa kewajaran laporan keuangan dengan empat jenis opini yang diberikan oleh BPK RI, yakni: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Namun terdapat permasalahan mengenai opini audit terkait dengan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia yaitu, beberapa kasus korupsi pada pejabat Pemerintah Daerah memiliki opini audit pemerintah yang bagus (BPK RI, 2004a).

Merujuk pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 (IHPS 1) BPK RI 2021, kasus Bupati Lampung Selatan pada Bulan April tahun 2019 lalu mendapatkan opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tetapi berdasarkan hasil penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Lampung Selatan terbukti bersalah melakukan korupsi pencucian uang lebih dari Rp100 Miliar. Selain itu juga terdapat kasus suap terhadap auditor BPK yang dilakukan oleh Bupati Bogor senilai Rp 1,024 Miliar. Dalam kasus ini, KPK menyatakan bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 adalah buruk (BPK RI, 2021). Dengan demikian, Bupati Bogor menyuap anggota tim audit BPK agar mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adanya beberapa kasus tersebut menandakan bahwa Pemerintah Daerah berupaya mendapatkan opini WTP agar terlihat baik di mata masyarakat walaupun pada kenyataannya beberapa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak dijumpai kasus korupsi pada masing-masing daerahnya.

Beberapa penelitian terkait tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia telah dilakukan. Naibaho dan Yunita (2022) menyimpulkan bahwa secara parsial, opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi di departemen atau lembaga pemerintah. Secara simultan, variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, yang menunjukkan bahwa hasil audit dapat dijadikan acuan untuk mendeteksi indikasi korupsi di departemen atau lembaga pemerintah.

Penelitian lain oleh Panji dan Utomo (2023) menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi, sementara temuan audit tidak

berpengaruh signifikan. Upaya untuk menghasilkan opini dan temuan audit yang berkualitas terus dilakukan agar peluang korupsi dapat diminimalkan (Nurfaidah & Novita, 2022). Namun, terdapat beberapa kasus di mana pemerintah daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap tersandung korupsi. Hal ini memunculkan keraguan masyarakat terhadap kredibilitas hasil audit BPK dalam menangani kasus korupsi (Verawaty, 2019).

Perbedaan penelitian ini meneliti tentang korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui temuan dan opini audit terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah, **“Pengaruh Temuan Audit dan Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia “**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Temuan Audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana Opini Audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melakukan pengujian dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Temuan Audit terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia
2. Untuk melakukan pengujian dan membuktikan secara empiris mengenai Opini Audit terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang Ilmu Ekonomi khususnya Akuntansi yaitu, Akuntansi Auditing yang terkait dengan pengaruh Temuan Audit dan Opini Audit terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi Responden diharapkan menjadi sarana untuk auditor dalam mengaudit agar meningkatkan kualitas pemeriksaan, mengumpulkan bukti yang valid, dan memberikan opini terhadap laporan keuangan, serta menjadi bahan acuan peneliti berikutnya mengembangkan topik tentang pengaruh Temuan Audit dan Opini Audit terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. *Grand Theory*

2.1.1. *Fraud Triangle*

Landasan utama dalam penelitian ini adalah Teori *Fraud Triangle*, yang pertama kali dikembangkan oleh Donald Cressey (1953), adalah model yang menjelaskan penyebab terjadinya kecurangan atau korupsi dalam bisnis. Teori *Fraud Triangle* sangat relevan dalam memahami korupsi karena korupsi juga merupakan bentuk kecurangan yang sering kali dipicu oleh kombinasi dari tekanan, peluang, dan pembenaran (Machado & Gartner, 2018). Korupsi sering kali terjadi karena ada tekanan finansial atau sosial yang memaksa seseorang untuk mencari keuntungan secara ilegal, ada peluang yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan korupsi, dan ada pembenaran yang membenarkan tindakan tersebut

Teori ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Menurut Wicaksono dan Prabowo (2022), keterkaitan Teori *Fraud Triangle* dengan Korupsi:

1. Tekanan (*Pressure*): Tekanan merujuk pada situasi yang memaksa seseorang untuk melakukan kecurangan yang berupa tekanan finansial, tekanan dalam hubungan, atau tekanan dari lingkungan sosial. Tekanan ini dapat membuat

seseorang merasa bahwa kecurangan adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan mereka atau untuk mencapai tujuan mereka.

2. Peluang (*Opportunity*): Peluang merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki akses atau kesempatan untuk melakukan kecurangan yang berupa memberikan akses ke aset perusahaan atau kontrol yang memungkinkan pelaku untuk melakukan penyimpangan. Peluang ini penting karena tanpa akses atau kesempatan, kecurangan tidak dapat terjadi.
3. Pembenaan (*Rationalization*): Pembenaan adalah proses di mana pelaku kecurangan mencari alasan untuk melakukan tindakan yang salah, yang berupa rasionalisasi untuk membenarkan tindakan mereka, seperti "saya melakukan ini karena saya tidak digaji secara layak" atau "keuntungan perusahaan terlalu besar dan tidak dibagi secara adil". Pembenaan ini memungkinkan pelaku untuk menyalahkan situasi atau orang lain, sehingga mereka merasa tidak bersalah.

Kecurangan secara umum semakin meningkat sebagai isu yang signifikan. Berdasarkan berbagai data statistik, terlihat peningkatan dalam kasus penipuan keuangan dan penggunaan data pribadi setiap tahunnya. Ini mencakup penipuan dengan kartu kredit, penipuan pajak, penipuan asuransi, dan beragam jenis penipuan lainnya

2.2. Variabel Penelitian

2.2.1. Korupsi

Tindakan illegal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan posisi dan jabatan suatu pemerintahan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain biasa disebut dengan korupsi. Dalam sisi audit, korupsi sering dianggap sebagai penyalahgunaan dana publik, pemalsuan dokumen keuangan, atau tindakan lain yang merugikan keuangan dan asset (Fuadi & Mabrur, 2021).

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa, Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud dan/atau tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (BPK RI, 2001). Perspektif hukum pada UU No.20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencakup setidaknya 30 macam tindak pidana rasuah, dan dibagi pada tujuh kategori yang berbeda. Kategori tersebut meliputi: (1) Kerugian keuangan negara, (2) Suap-menyuap, (3) Penggelapan dalam jabatan, (4) Pemerasan, (5) Perbuatan curang, (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) Gratifikasi.

Sedangkan menurut *Accociation of Certified Fraud Examiners* (ACFE), Korupsi terdiri dari empat macam, yaitu: *Conflict of Interest* atau benturan kepentingan, *Bribery* atau penyuapan, *Illegal Gratuities* atau pemberian hadiah sebagai penyuapan, dan *Economic Extortion* atau pemerasan (ACFE, 2020). Maka dari itu, korupsi sering kali merugikan berbagai pihak dengan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan,

atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang didapatkan dengan cara tidak sah atau illegal. Menurut Ridha (2017), variabel dependent atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan variabel lain atau variabel bebas. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependent yaitu korupsi.

2.2.2. Temuan Audit

Keberhasilan audit independen dalam memeriksa informasi keuangan atau operasional suatu entitas adalah kunci utama untuk memastikan bahwa informasi tersebut tetap jujur, transparan, dan dapat diandalkan. Auditor memiliki tugas penting dalam menilai apakah entitas tersebut mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan praktik terbaik, serta dalam mengidentifikasi potensi risiko atau penyimpangan yang bisa memengaruhi keandalan informasi tersebut. Menurut (BPK RI 2022), pengauditan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK juga menghasilkan laporan yang memuat berbagai temuan yang ditemukan selama proses audit. Profitabilitas temuan audit mengacu pada hasil pemeriksaan BPK yang mencakup aspek pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Temuan audit ini merujuk pada pelanggaran terhadap ketentuan yang teridentifikasi selama proses audit berlangsung (Nunu et al., 2017).

BPK akan menyampaikan hasil temuan audit dalam laporan yaitu, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), temuan audit terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dibagi menjadi lima sub-kelompok:

1. Sub-kelompok pertama hasil ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kerugian negara atau daerah, termasuk kerugian

perusahaan milik negara atau daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa tindakan melanggar hukum menyebabkan penurunan kekayaan moneter, surat berharga, dan aset lainnya.

2. Sub-kelompok kedua dari hasil temuan adalah mengungkapkan tindakan ilegal, baik disengaja maupun lalai yang dapat mengancam kerugian negara pada masa yang akan datang.
3. Sub-kelompok ketiga dari temuan ini adalah dalam hal kekurangan penerimaan negara atau daerah, menyatakan bahwa penerimaan yang seharusnya menjadi hak negara atau daerah belum masuk ke kas negara atau daerah karena pelanggaran peraturan dan undang-undang.
4. Sub-kelompok keempat dari temuan ini berkaitan dengan temuan administratif yang mengungkapkan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran. Namun, pelanggaran ini tidak menyebabkan kerugian atau potensi kerugian bagi negara atau daerah, tidak menghambat pelaksanaan program entitas, dan tidak menunjukkan indikasi tindak pidana.
5. Sub-kelompok terakhir yakni, hasil indikasi tindak pidana yang menunjukkan bahwa tindakan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang yang berlaku dan diancam dengan sanksi pidana menurut undang-undang yang terkait.

2.2.3. Opini Audit

Auditor bertanggung jawab merencanakan dan menjalankan audit dengan teliti, serta mengumpulkan bukti audit yang mencukupi untuk mendukung pendapat yang

akan diberikan. Mereka juga harus menjalankan audit secara independen dan obyektif. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebutkan bahwa opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (BPK RI, 2004a). Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2022), yakni: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berarti bahwa, auditor memberikan pendapat ini apabila laporan keuangan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), penjelasan atau pengungkapan tidak menyesatkan bagi pengguna dan tidak terdapat ketidakpastian yang signifikan setelah audit sesuai dengan standar auditing yang berlaku.

Sedangkan yang termasuk dalam penyimpangan dibagi menjadi tiga opini, yakni:

1. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah, ketika laporan keuangan secara umum disajikan dengan baik, tetapi ada beberapa masalah atau pengecualian yang mengganggu kesesuaian laporan keuangan, yang menghasilkan opini dapat diterima. Oleh karena itu, auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian.
2. Opini Tidak Wajar (TW) adalah, ketika auditor menemukan bahwa laporan keuangan tidak menunjukkan secara wajar kondisi keuangan dan hasil operasi

sesuai dengan persyaratan PABU, sehingga terdapat pengecualian atau kualifikasi terhadap kewajaran penyajian yang bersifat material, seperti terdapat banyak rekening yang tidak wajar dalam laporan keuangan.

3. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menunjukkan bahwa, pendapat auditor tidak tercakup dalam laporan audit. Laporan audit dapat diterbitkan tanpa pendapat auditor jika terdapat beberapa kondisi yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Auditor tidak merasa yakin atau meragukan kredibilitas laporan keuangan
 - b. Auditor hanya melakukan kompilasi laporan keuangan, bukan audit
 - c. Auditor tidak berpihak sendiri terhadap pihak yang diaudit
 - d. Laporan keuangan dipengaruhi oleh banyak ketidakpastian.

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1	(Panji & Utomo, 2023)	Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2015- 2020)	Variabel Y: Tingkat korupsi Variabel X: X1: Opini Audit X2: Temuan Audit	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa opini audit memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, Sedangkan temuan audit tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat korupsi.
2	(Syahrir & Suryani, 2020)	Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap	Variabel Y: Tingkat Korupsi	Berdasarkan hasil uji signifikansi opini audit dan temuan audit

		Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017)	Variabel X: X1: Opini Audit X2: Temuan Audit	secara simultan berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Secara parsial, variabel opini audit dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.
3	(Pertiwi & Haryanto, 2022)	Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Kerugian Daerah Terhadap Tingkat Korupsi di Jawa Tengah	Variabel Y: Tingkat Korupsi Variabel X: X1: Opini Audit X2: Temuan Audit X3: Kerugian Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Selain itu, Temuan audit juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi Demikian juga. Kerugian daerah tidak menunjukkan pengaruh terhadap tingkat korupsi.

2.4. Kerangka Penelitian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Temuan audit dihasilkan ketika auditor menjalankan pengecekan terhadap laporan keuangan (Ningsih, 2022). Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) BPK Nomor 1 Tahun 2017, temuan audit mencakup aspek pengendalian

internal, kepatuhan berkaitan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan temuan penyelewengan serta ketidakpatuhan yang selanjutnya ditampilkan menurut elemen temuan dari jenis, kondisi, sebab dan akibat (Syahrir & Suryani, 2020).

Temuan audit, terutama yang berupa kerugian negara, ketidakpatuhan terhadap peraturan, atau kelemahan pengendalian internal, sering kali mencerminkan ketidakefisienan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa, jumlah temuan yang tinggi menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam tata kelola keuangan yang membuka peluang korupsi. Pada penelitian terdahulu Naibaho dan Yunita (2022), Berdasarkan hasil penelitian temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah, Hal demikian juga sejalan dengan penelitian Amyulianthy et al (2022). Sedangkan menurut penelitian dari Pertiwi dan Haryanto (2022) yang sejalan juga dengan penelitian milik Panji dan Utomo (2023), hasil dari penelitian menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia.

H1: Temuan Audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2020-2022

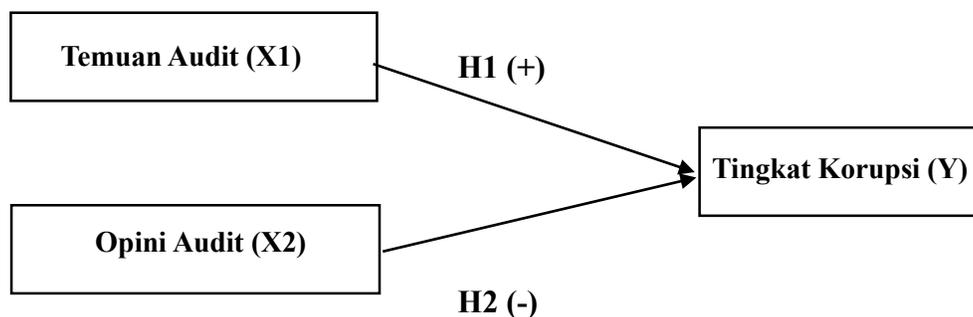
2.4.2. Pengaruh Opini Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Auditor bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan mengumpulkan bukti audit yang mencukupi untuk mendukung kesimpulan yang dibuat (Husna et al., 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit didefinisikan sebagai pernyataan profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Perdana & Prasetyo, 2023). Pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yaitu pemerintah daerah yang mampu menunjukkan keteraturan dan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku (BPK RI, 2004a). Tingkat korupsi dalam pemerintah daerah akan semakin rendah jika laporan keuangan dapat disajikan dengan opini wajar tanpa pengecualian. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya oleh Panji dan Utomo (2023), menunjukkan bahwa opini memengaruhi tingkat korupsi pada pemerintah. Penelitian ini juga sejalan dengan Naibaho dan Yunita (2022) Opini audit memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi di kementerian/lembaga di Indonesia. Semakin tinggi kualitas opini audit yang diperoleh, menunjukkan bahwa kementerian/lembaga tersebut telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah dan sebaliknya.

H2: Opini Audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2020-2022.

2.5. Kerangka Penelitian



Gambar 3
Kerangka Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah temuan audit dan opini audit secara signifikan mempengaruhi Tingkat kasus korupsi pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia.



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis Penelitian

Pemilihan jenis penelitian tidak hanya mempengaruhi pendekatan metodologis, tetapi juga memberikan landasan yang kokoh untuk menggali lebih dalam fenomena yang akan diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Amruddin et al (2022), penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian ilmiah yang sistematis tentang elemen dan fenomena serta hubungan antara mereka. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dengan menggunakan angka atau statistik untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.

1.2. Populasi dan Sampel

Pentingnya memahami landasan konseptual menjadi hal utama yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan metodologi. Penelitian tidak hanya berkaitan tentang pemilihan subjek penelitian yang akan diteliti, tetapi juga tentang relevansi dan representasi hasil yang diinginkan. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu populasi dari Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia yang terdapat jumlah kasus korupsi sebanyak 32 Provinsi.

Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* ini menggunakan pertimbangan atau teknik pemilihan dengan beberapa kriteria tertentu. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. (Sugiyono, 2013). Penentuan sampel ini

menggunakan laporan IHPS dan ICW, dengan kriteria penetapan sampel penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia yang memperoleh temuan audit dan opini audit dari BPK RI
2. Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia yang terdapat kasus korupsi berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)*
3. Ketersediaan data yang memadai untuk seluruh variabel pada rentang waktu 2020-2022.

Berikut penetapan jumlah sampel yang sesuai dengan kualifikasi:

Tabel 3. 1 Sampel yang memenuhi kualifikasi

No	Keterangan	Jumlah
1	Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	34
2	Provinsi yang tidak ditemukan temuan audit tahun 2020-2022	(2)
3	Total Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia x 3 tahun	32 x 3
Jumlah sampel akhir penelitian		96

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2024)

3.3. Jenis dan Sumber Data

Pemilihan jenis dan sumber data yang tepat adalah kunci untuk mengungkapkan suatu fenomena yang diteliti dengan tepat dan akurat. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh bukan dari pengumpulan data secara langsung oleh peneliti. Data sekunder yang diambil pada penelitian ini berupa data Laporan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)

Pemerintah Daerah pada BPK RI dan laporan jumlah kasus tingkat korupsi pada *Indonesia Corruption Watch (ICW)*.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahapan yang penting untuk menentukan hasil penelitian adalah metode pengumpulan data, karena akan mempengaruhi akurasi dan kesahihan data yang diperoleh. Metode ini merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data dari sumber data instansi yang mendukung penelitian dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dari sumber data sekunder.

3.5. Variabel dan Definisi Operasional

Pemahaman terkait dengan konsep dan terminologi yang digunakan setiap penelitian sangatlah penting. Dua konsep yang sering muncul adalah variabel dan definisi operasional. Menurut Hardani et al (2020), variabel penelitian merupakan karakteristik dan sifat suatu objek yang diamati dalam penelitian. Sementara itu, definisi operasional adalah penjabaran dari variabel yang diteliti hingga bersifat operasional, sehingga dapat diukur menggunakan alat ukur penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan berupa temuan audit dan opini audit, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran yang jelas, maka masing-masing variabel didefinisikan secara operasional.

3.5.1. Variabel Independen Temuan Audit (X1)

Temuan audit dihasilkan melalui proses pemeriksaan yang dilakukan auditor terhadap laporan keuangan. Berdasarkan SPKN BPK Nomor 1 Tahun 2017, temuan audit berupa pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta indikasi penyelewengan dan ketidakpatuhan yang selanjutnya ditampilkan menurut elemen temuan dari jenis, kondisi, sebab dan akibat. (Syahrir & Suryani, 2020)

3.5.2. Variabel Independen Opini Audit (X2)

Opini audit yaitu suatu hasil yang dikeluarkan oleh auditor untuk mencerminkan kewajaran dan kesesuaian antara informasi dari laporan yang ada dengan laporan hasil nyata dari lapangan. Opini audit akan dibagi menjadi dua kategori yaitu, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (Ghozali, 2018).

3.5.3. Variabel Dependen Tingkat Korupsi (Y)

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa, Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud dan/atau tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

No	Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Korupsi (Y)	Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud dan/atau tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.	<p>Jumlah nilai kerugian negara/ korupsi yang ditemukan berdasarkan (ICW) <i>Indonesia Corruption Watch</i>.</p> <p>Korupsi dapat dirumuskan sesuai dengan peraturan BPK Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara (PKN).</p> <p>: <u>Nilai kerugian perProvinsi</u> Total anggaran perProvinsi kemudian dilogaritman</p>
2	Temuan Audit (X1)	Temuan kasus yang ditemukan oleh BPK	Jumlah temuan BPK atas SPI dan kepatuhan

		terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	terhadap peraturan perundang-undangan yang termuat dalam LHP, yang mengacu pada Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. : <u>Temuan Audit perProvinsi</u> Jumlah LKPD perProvinsi
3	Opini Audit (X2)	Opini yang diberikan auditor atas kewajaran laporan keuangan	Menggunakan <i>Dummy</i> Opini Audit WTP = 1 Selain WTP = 0 Opini Audit dapat diproksikan dengan menghitung jumlah Opini WTP yang mengacu pada Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

			dan Tanggungjawab Keuangan Negara <u>Jml opini WTP perProvinsi</u> Total LKPD perProvinsi
--	--	--	--

3.6. Metode Analisis Data

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik memegang peranan sangat penting dalam penelitian dan analisis data. Salah satu cabang utama dari statistik adalah statistik deskriptif. Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif merupakan Teknik yang mendeskripsikan suatu data penelitian melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, *sum*, *range*. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang digunakan untuk mengetahui gambaran variabel temuan audit dan opini audit pada tingkat korupsi pemerintah daerah.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Hasil analisis regresi linear berganda sangat bergantung pada pemenuhan beberapa asumsi dasar yang dikenal sebagai asumsi klasik. Istilah BLUE (*Best Linear Unbiased Etimator*) diperkenalkan dalam Teorema Gauss-Markov, menyatakan bahwa sebuah model regresi linear klasik yang dihasilkan dapat memenuhi asumsi-asumsi klasik seperti tidak adanya multikolinearitas, homoskedastisitas dan tidak ada autokorelasi. Jika asumsi klasik Teorema Gauss-Markov terpenuhi, maka BLUE akan

menghasilkan estimasi koefisien terbaik, linier, tidak bias, dan memiliki varians terkecil.

3.6.2.1. Uji Normalitas

Salah satu asumsi yang sering kali harus dipenuhi adalah asumsi normalitas. Asumsi ini menyatakan bahwa data, khususnya residu atau kesalahan dari model regresi, seharusnya mengikuti distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk memeriksa apakah variabel residual pada model regresi mempunyai penyebaran yang normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan Uji *Saphiro-Wilk*. Uji *Shapiro-Wilk* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut (Shapiro & Wilk 1965):

H0: Data berdistribusi normal

H1: Data tidak berdistribusi normal

Kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $p\text{-value} > 0,05$ menunjukkan data berdistribusi normal.
- b. Jika $p\text{-value} < 0,05$ menunjukkan data tidak berdistribusi normal.

3.6.2.2. Uji Multikolinearitas

Masalah potensial yang bisa muncul dan mempengaruhi validitas hasil analisis regresi linear berganda adalah multikolinearitas. Uji multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki korelasi yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak stabil, mengurangi akurasi prediksi, dan mempersulit interpretasi model. Multikolinearitas dapat diuji dengan mengamati nilai VIF dan toleransi. Jika semua variabel bebas memiliki nilai

VIF < 10 , maka menunjukkan tidak adanya multikolinearitas dalam model regresi. Sebaliknya, jika terdapat nilai VIF > 10 , maka multikolinearitas terdeteksi dalam model regresi (Ghozali, 2018).

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi klasik yang harus dipenuhi agar model dapat menghasilkan estimasi valid adalah homoskedastisitas, dimana suatu kondisi variabilitas dari residual atau kesalahan prediksi menghasilkan hasil yang konstan di seluruh rentang nilai variabel independen. Ketika asumsi ini dilanggar, dan variabilitas residual berubah-ubah, maka masalah yang dihasilkan biasa disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2018), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam regresi terdapat perbedaan variabel residual antara pengamatan satu dengan pengamatan lainnya.

Uji Gleser ini dilakukan dengan cara meregresi variabel independen menggunakan nilai absolute residual sebagai variabel independen. Residual yang dihasilkan adalah selisih antara nilai observasi dan nilai prediksi, sedangkan absolute yakni nilai mutlak. Tingkat kepercayaan uji gleser jika $> 0,05$, maka menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model. Jika $< 0,05$ maka terdapat heteroskedastisitas.

3.6.2.4. Uji Autokorelasi

Residual atau kesalahan prediksi dari model tidak saling berkorelasi satu sama lain biasa dikenal dengan autokorelasi. Autokorelasi dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak efisien dan hasil analisis menjadi bias, terutama dalam analisis data time series atau data yang diambil secara berurutan. Uji autokorelasi pada

penelitian ini, melakukan pengujian antar sampel yang didesain berdasarkan waktu dan tempat menggunakan model *Durbin Watson* (DW). Ghozali (2018), Ada tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson dengan ketentuan berikut:

1. Jika $dW < dL$ atau $>$ dari $(4-dL)$, maka hipotesis nol ditolak, yang artinya terdapat autokorelasi
2. Jika dW terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang artinya tidak ada autokorelasi.
3. Jika dW terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4dL)$, maka tidak menghasilkan Kesimpulan yang pasti. Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel Durbin Watson yang berdasarkan jumlah sampel dan jumlah variabel yang dijelaskan.

3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Hubungan antarvariabel dalam penelitian sangat penting untuk mengeksplorasi dan memodelkan pengaruh antarvariabel, salah satunya melalui analisis regresi linear berganda. Metode ini dilakukan untuk menguji dan memahami bagaimana beberapa variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Penelitian ini menganalisis pengaruh temuan audit dan opini audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia menggunakan data panel. Data panel yang digunakan menggabungkan time series dengan cakupan waktu tiga tahun (2020–2022) dan cross section yang mencakup pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Persamaan yang digunakan dalam menguji hipotesis yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

(Ghozali, 2018)

Keterangan:

Y : Tingkat Korupsi

α : Konstanta

β_1, β_2 : Koefisien Regresi

X_1 : Opini Audit

X_2 : Temuan Audit

e : Error

3.6.4. Uji Hipotesis

Asumsi mengenai populasi berdasarkan data sampel disebut dengan uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk mendukung atau menolak hipotesis awal tentang karakteristik populasi. Pengujian hipotesis pada penelitian ini, dilakukan tiga jenis pengujian yakni, Uji t (Parsial), Uji F (simultan) dan Uji Koefisien Determinasi (R^2).

3.6.4.1. Uji t Parsial

Dalam analisis statistik, uji statistik t digunakan untuk menguji hipotesis tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Pada penelitian ini, uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh satu variabel independen terhadap variasi pada variabel dependen dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dari dua kelompok atau satu kelompok yang berbeda dari suatu nilai

tertentu. Jika hipotesis nol (H_0) pada uji t, maka variabel independen tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada variabel dependen. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dengan uji t yaitu dengan pengujian.

$H_0: \beta_i = 0$ artinya masing-masing variabel bebas tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel terikat.

$H_1: \beta_i \neq 0$ artinya masing-masing variabel bebas ada pengaruh yang signifikan dari variabel terikat.

Bila probabilitas $> 5\%$ maka variabel independen tidak signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (H_0 diterima, H_1 ditolak).

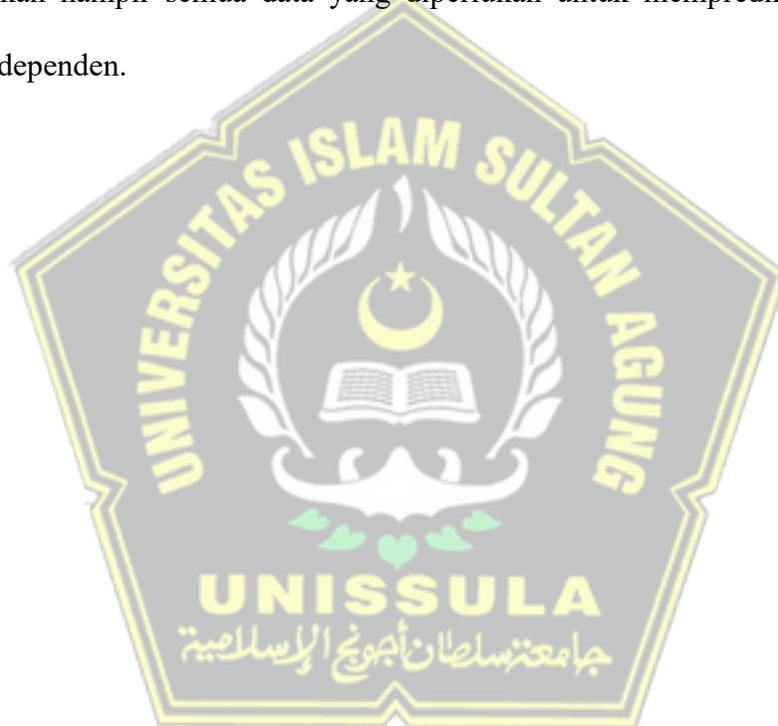
Bila probabilitas $< 5\%$ maka variabel independen dianggap signifikan atau memiliki berpengaruh terhadap variabel terikat (H_0 ditolak, H_1 diterima) Ghozali (2018).

3.6.4.2. Uji F Simultan

Dalam analisis statistik, uji statistik F digunakan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Tingkat signifikansi penelitian ini adalah 0,05 ($\alpha = 5\%$). Kriteria pengujian adalah H_0 diterima jika $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$, yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan, dan H_0 ditolak jika $F \text{ hitung}$ lebih besar dari $F \text{ tabel}$, yang menunjukkan pengaruh signifikan. Selain itu, variabel bebas dianggap tidak signifikan atau tidak memengaruhi variabel terikat jika probabilitas (p-value) lebih dari 5%, dan sebaliknya dianggap signifikan jika probabilitas (p-value) kurang dari 5%.

3.6.4.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen, menurut Ghozali (2018). Kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, menurut nilai R^2 . Jika nilainya hampir sama, variabel independen dapat memberikan hampir semua data yang diperlukan untuk memprediksi variasi pada variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Sampel yang dianalisis pada penelitian ini adalah Provinsi di Indonesia yang terdapat kasus korupsi. Untuk proses pengambilan sampel jumlah Provinsi di Indonesia ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Proses Pengambilan Sampel Penelitian Tahun 2020-2022

No	Kriteria Sampel	Jumlah Provinsi di Indonesia yang Sesuai Kriteria
1	Provinsi di Indonesia yang terdapat kasus korupsi	32
2	Provinsi di Indonesia yang memiliki Opini Audit tahun 2020-2022 (3 Tahun)	32
3	Provinsi di Indonesia yang terdapat Temuan Audit terhadap kasus korupsi tahun 2020-2022 (3 Tahun)	32
Jumlah Data Sampel Penelitian		32 x 3 Tahun = 96 Data

Sumber: Data BPK RI yang diolah

Berbasis pada penjabaran tabel proses pengambilan sampel penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Provinsi di Indonesia yang ditemukan adanya Temuan Audit atas kasus korupsi tahun 2020 sampai tahun 2022 terdapat 32 Provinsi, sehingga total data yang akan diteliti berjumlah 96 data untuk setiap variabel.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif variabel selama periode pengamatan yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2022. Informasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minim um	Maxim um	Sum	Mean	Std. Deviation
Temuan Audit	96	.26	22.00	111.93	1.1659	3.41864
Opini Audit	96	.50	1.00	89.72	.9346	.09969
Korupsi	96	.00	.93	69.95	.7286	.16378
Valid N (listwise)	96					

Sumber: Data Sekunder yang diolah (Lampiran 8)

Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif variabel yang telah disajikan, diperoleh keterangan untuk Temuan Audit memiliki nilai minimum sebesar 0,26, sehingga nilai terkecil dari temuan audit adalah 0,26. Sementara nilai maximum Temuan Audit senilai 22,00. Sedangkan nilai Mean (Rata-rata) untuk Temuan Audit sebesar 1,1659, yang artinya secara umum, jumlah Temuan Audit dalam data ini cukup kecil dibandingkan nilai maksimum (22,00). Standard Deviation (Simpangan Baku) untuk Temuan Audit senilai 3,41864, simpangan baku yang cukup tinggi menunjukkan bahwa ada variasi yang cukup besar dalam Temuan Audit antar data. Artinya, beberapa unit memiliki temuan audit yang sangat tinggi sementara yang lain rendah.

Variabel Opini Audit memperoleh nilai minimum sebesar 0,50, sedangkan nilai maximum senilai 1,00. Nilai mean (Rata-rata) pada Opini Audit sebesar 0,9346, yang menunjukkan bahwa sebagian besar Opini Audit dalam data ini bernilai tinggi atau mendekati 1. Standard Deviation (Simpangan Baku) pada Opini Audit diketahui sebesar 0,09969, dengan demikian, simpangan baku yang rendah menunjukkan bahwa

tidak ada banyak variasi dalam Opini Audit antar data. Artinya, sebagian besar Opini Audit memiliki nilai yang relatif mirip atau nilai yang seragam, dan dengan rata-rata yang mendekati maksimum, menunjukkan bahwa sebagian besar Opini Audit adalah opini yang baik atau wajar.

Variabel Korupsi memiliki nilai minimum sebesar 0,00. Nilai terkecil dari tingkat korupsi adalah 0,00, yang menunjukkan tidak ada kasus korupsi di beberapa provinsi dalam penelitian ini. Sedangkan nilai maximum sebesar 0,93, yang menunjukkan tingkat korupsi yang relatif tinggi dalam beberapa kasus. Mean (Rata-rata) tingkat korupsi sebesar 0,7286, yang berarti secara umum, tingkat korupsi dalam penelitian ini cenderung berada pada nilai yang cukup tinggi atau dekat dengan nilai maksimum. Standard Deviation (Simpangan Baku) pada tingkat korupsi adalah sebesar 0.16378. Tingkat korupsi antar data memiliki variasi yang cukup signifikan dengan rata-rata yang tinggi, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia dalam data ini cukup tinggi secara umum.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Dibawah ini adalah tabel hasil analisis Uji Normalitas dengan menggunakan metode Shapiro- Wilk:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Korupsi	.979	92	.137

Sumber: Data Sekunder yang diolah (Lampiran 9)

Hasil uji dari analisis dalam tabel Uji Normalitas menunjukkan bahwa signifikansi Shapiro-Wilk sebesar 0,137 yang lebih dari nilai signifikan 0,05. Oleh karena itu, hasil uji normalitas tersebut menandakan bahwa data dalam model regresi pada penelitian ini berdistribusi dengan normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Berikut adalah tabel hasil dari Uji Multikolinearitas dengan menggunakan metode indikasi nilai *Variance Inflation Factor*:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	-.209	.075		-2.790	.006		
Temuan Audit	.008	.002	.333	3.307	.001	.982	1.018
Opini Audit	-.083	.080	-.104	-1.036	.303	.982	1.018

a. Dependent Variable: Korupsi

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 10)

Melihat pada hasil Uji Multikolinearitas pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF untuk Temuan Audit sebesar 1,018 dan nilai pada Opini Audit sebesar 1,018. Nilai VIF pada masing-masing variabel independen kurang dibawah nilai 10,00, yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas, dengan kata lain Temuan Audit dan Opini Audit tidak memiliki korelasi yang kuat satu sama lain yang dapat mengganggu analisis regresi pada penelitian ini.

4.3.3 Uji Heterokedstisitas

Berikut adalah tabel hasil dari Uji Heterokedstisitas yang menggunakan Uji

Gletser:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heterokedstisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.150	.134		-	.266
				1.120	
X1	-.003	.004	-.074	-.723	.472
X2	.250	.143	.180	1.755	.083

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 11)

Melihat hasil analisis dari hasil tersebut menandakan bahwa nilai signifikansi setiap variabel lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari kedua variabel independen terbukti tidak ada masalah heterokedstisitas yang terdeteksi dalam model regresi tersebut.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Berikut tabel hasil Uji Autokorelasi menggunakan metode Uji Durbin Watson:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.196 ^a	.038	.018	.16233	1.929

a. Predictors: (Constant) Temuan Audit, Opini Audit

b. Dependent Variable: Korupsi

Sumber: Data Sekunder yang diolah (Lampiran 12)

Berdasarkan hasil dari Uji Autokorelasi yang menggunakan metode Durbin Watson, menunjukkan nilai sebesar 1.929, nilai ini menandakan bahwa tidak ada autokorelasi signifikan dalam residual model regresi karena nilai dW terletak antara dU dan 4-dU, Dengan kata lain nilai residual tidak berkorelasi satu sama lain dan asumsi tersebut terpenuhi.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut adalah hasil Analisis Regresi Linear Berganda dari persamaan regresi penelitian yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.209	.075			-2.790	.006
	X1	.008	.002	.333		3.307	.001
	X2	-.083	.080	-.104		-1.036	.303

Sumber: Data Sekunder yang diolah (Lampiran 13)

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Linear Berganda yang disajikan pada tabel diatas, diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0.209 + 0.008X_1 - 0.083X_2$$

1. Nilai koefisien untuk Temuan Audit (X1) adalah sebesar 0,008 yang berarti bahwa setiap peningkatan satu unit pada Temuan Audit akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,008 terhadap tingkat korupsi. Hal ini menunjukkan

bahwa Temuan Audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat korupsi.

2. Nilai koefisien untuk Opini Audit (X2) adalah sebesar -0,083, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu unit pada Opini Audit akan menyebabkan penurunan sebesar 0,083 pada tingkat korupsi. Dengan hal ini, dapat disimpulkan bahwa Opini Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi dalam penelitian ini.

4.5 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Informasi hasil dari Uji t Parsial disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji t Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.209	.075		-2.790	.006
Temuan Audit	.008	.002	.333	3.307	.001
Opini Audit	-.083	.080	-.104	-1.036	.303

Sumber: Data Sekunder yang diolah (Lampiran 14)

Berbasis pada tabel analisis Uji Hipotesis Parsial, mempresentasikan hasil analisa uji sebagai berikut:

1. Variabel X1 (Temuan Audit), memiliki nilai t sebesar 3,307 dengan signifikansi 0,001. Nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Temuan Audit memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap korupsi sebagai variabel dependen, dengan kata lain bahwa

perubahan pada Temuan Audit berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat korupsi.

2. Variabel X2 (Opini Audit), memiliki nilai t sebesar -1,036 dengan signifikansi 0,303. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Opini Audit tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat korupsi, maka hipotesis ditolak.
3. Model regresi ini menunjukkan bahwa hanya Temuan Audit yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, sedangkan Opini Audit tidak memberikan dampak signifikan terhadap tingkat korupsi pada analisis ini.

4.6 Uji F Simultan

Hasil analisis Uji F Simultan yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.066	2	.033	5.648	.005 ^b
	Residual	.522	89	.006		
	Total	.588	91			

Sumber: Data Sekunder yang diolah (Lampiran 15)

Kesimpulan dari hasil analisis Uji F Simultan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi Uji F Simultan adalah 0,005, nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen, Temuan Audit dan Opini Audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, korupsi.

4.7 Uji Koefisien Determinasi

Berikut adalah tabel hasil Uji Koefisien Determinasi:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.336 ^a	.113	.093	.07659

a. Predictors: (Constant), Temuan Audit, Opini Audit

b. Dependent Variable: Korupsi

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 16)

Merujuk pada tabel hasil Uji Koefisien Determinasi di atas, ditemukan bahwa nilai R-Square memiliki nilai sebesar 0,113, dengan kata lain model regresi ini dapat menjelaskan sebesar 11.3% variasi dalam tingkat korupsi yang dipengaruhi oleh Temuan Audit dan Opini Audit. Sedangkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,093, yang menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen dalam model ini tidak terlalu besar dan ada banyak faktor atau variabel-variabel lain yang tidak termasuk kedalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan Hasil Analisis Penelitian

4.8.1 Pengaruh Temuan Audit terhadap Korupsi di Indonesia

Uji hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa Temuan Audit memiliki pengaruh yang signifikan secara positif terhadap tingkat korupsi, artinya ini menunjukkan bahwa semakin banyak Temuan Audit yang ditemukan, semakin tinggi tingkat korupsi yang terdeteksi pada setiap provinsi yang dianalisis dan sebaliknya. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan data temuan yang menunjukkan

bahwa Temuan Audit menunjukkan hasil yang baik. Ada beberapa alasan mengapa Temuan Audit dapat menunjukkan kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik tetapi korupsi tetap besar yaitu, adanya kepatuhan yang tidak menyeluruh, meskipun ada kepatuhan terhadap regulasi tetapi kepatuhan tersebut tidak mencakup semua aspek yang diperlukan untuk mencegah adanya korupsi. Kemudian adanya proses yang tidak efektif dan pengawasan yang lemah, meskipun proses SPI dan kepatuhan terhadap regulasi ada tetapi, jika tidak dijalankan secara efektif tanpa pengawasan yang ketat maka, dapat menyebabkan kebocoran dan kerugian contohnya seperti, prosedur yang lambat atau tidak tepat sasaran dapat membuat celah bagi korupsi.

Hal ini diperkuat dengan Teori *Fraud Triangle*, yang terdiri dari tiga faktor utama yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan yang dihadapi individu atau kelompok dalam organisasi pemerintah dapat memicu perilaku korupsi, terutama ketika terdapat tuntutan finansial, kepentingan pribadi atau politis yang sulit dipenuhi, sehingga dapat menjadi kesempatan bagi individu untuk memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan dan pengelolaan anggaran yang lemah. Temuan audit ini juga mencerminkan adanya rasionalisasi dimana pelaku korupsi mencari justifikasi untuk melegitimasi perbuatannya, sebagai contoh dengan anggapan bahwa tindakan mereka adalah bagian dari kebiasaan atau kelemahan sistemik yang sudah lazim.

Fraud Triangle, dapat menimbulkan korupsi terus terjadi meskipun ada pengawasan. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat korupsi, diperlukan upaya penguatan sistem audit, pengurangan tekanan yang dialami pejabat publik, serta

pembenahan budaya integritas dan akuntabilitas di berbagai lembaga pemerintah. Konklusi dari analisis dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Naibaho & Yunita, 2022), yang menyatakan bahwa Temuan Audit membuktikan berpengaruh terhadap tingkat korupsi baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah.

4.8.2 Pengaruh Opini Audit terhadap Korupsi di Indonesia

Uji hipotesis dalam penelitian ini membuktikan bahwa Opini Audit memiliki hubungan negatif dengan tingkat korupsi. Artinya, Opini Audit menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat korupsi seiring dengan peningkatan Opini Audit. Namun dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Opini audit yang baik tetap masih terdapat tingkat korupsi yang tinggi, sehingga Opini Audit tidak dapat digunakan sebagai prediktor yang kuat untuk perubahan tingkat korupsi dalam penelitian ini.

Opini Audit yang baik seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan indikator hasil dari evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan yang telah disusun dengan benar sesuai standar akuntansi, dengan fokus pada materialitas dan kepatuhan standar akuntansi. Dengan demikian, meskipun Opini Audit menunjukkan hasil yang baik, tetapi Opini Audit tidak menunjukkan wujud atau tidak selalu memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan dari tingkat korupsi yang rendah secara langsung.

Opini Audit WTP tidak menjamin bahwa tidak ada penyimpangan atau kecurangan diluar aspek standar akuntansi seperti korupsi, karena korupsi sering kali bersifat operasional dan tersembunyi yang tidak selalu tercermin dalam laporan

keuangan, sehingga membutuhkan mekanisme pengawasan tambahan seperti audit forensik. Sedangkan Opini Audit WTP tidak dirancang untuk mendeteksi dan berbeda dari audit forensik yang menyelidiki dugaan kecurangan dan mengungkapkan pola-pola transaksi korupsi yang sistemik. Dengan demikian, Opini Audit WTP hanya mencerminkan bahwa laporan keuangan tampak wajar secara administratif bukan bebas dari kecurangan seperti korupsi.

Dalam hal ini juga diperkuat oleh Teori *Fraud Triangle*, yang terdiri dari tiga komponen yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan korupsi. Seperti salah satu fenomena yang dilakukan Bupati Bogor menyuap anggota tim audit BPK agar mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyuapan ini merupakan salah satu kategori tindakan korupsi yang tertuang dalam UU No.22 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, meskipun suatu entitas mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal itu tidak berarti entitas tersebut bebas dari praktik korupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh, (Pertiwi & Haryanto, 2022), yang menunjukkan bahwa Opini Audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam analisis penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Temuan Audit terbukti memberikan pengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat korupsi di Indonesia, artinya ini menunjukkan bahwa semakin banyak Temuan Audit yang ditemukan, semakin tinggi tingkat korupsi yang terdeteksi pada setiap provinsi di Indonesia.
2. Opini Audit terbukti tidak memberikan pengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat korupsi di Indonesia, karena semua Opini Audit baik yang kurang baik adalah laporan keuangannya, sehingga tidak dapat secara langsung menjadi pengaruh yang kuat
3. Tingkat korupsi di Indonesia dalam penelitian ini dipengaruhi secara signifikan oleh Temuan Audit dan tidak dipengaruhi yang signifikan oleh Opini Audit pada setiap provinsi di Indonesia.

5.2 Saran

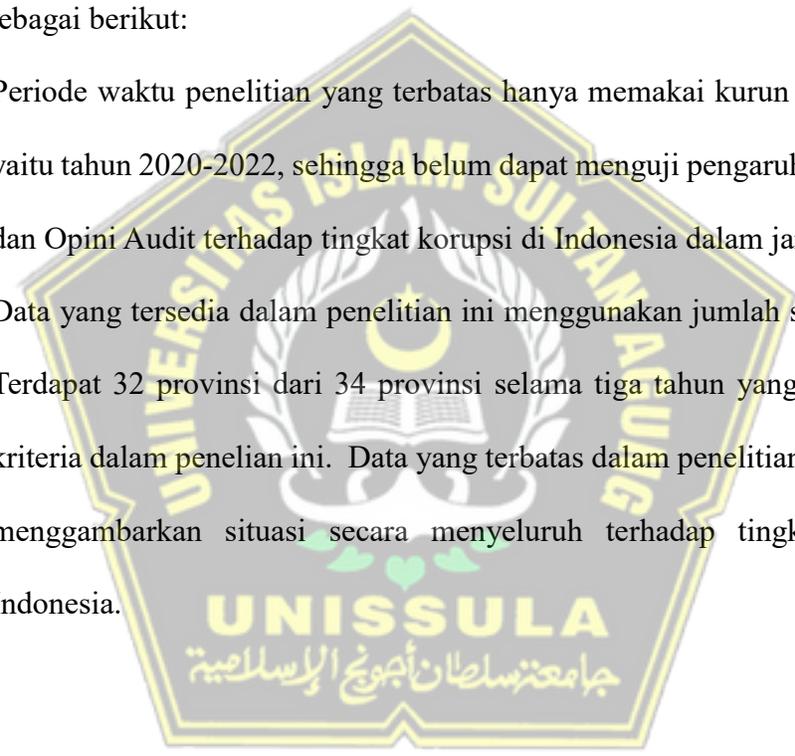
Saran yang dapat diambil dalam kesimpulan analisis penelitian ini terhadap tingkat korupsi di Indonesia yaitu, lebih ditingkatkan lagi kualitas pemeriksaan untuk auditor dalam mengumpulkan bukti yang valid, dan menindaklanjuti Temuan Audit dengan lebih tegas dan transparan untuk menekan perilaku korupsi, serta untuk

penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang memiliki keterkaitan terhadap tingkat korupsi sehingga, dapat menjadi pengembangan penelitian yang lebih akurat dalam hasil penelitian.

5.3 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini untuk agenda penelitian yang akan mendatang adalah sebagai berikut:

1. Periode waktu penelitian yang terbatas hanya memakai kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 2020-2022, sehingga belum dapat menguji pengaruh Temuan Audit dan Opini Audit terhadap tingkat korupsi di Indonesia dalam jangka panjang.
2. Data yang tersedia dalam penelitian ini menggunakan jumlah sampel 96 data. Terdapat 32 provinsi dari 34 provinsi selama tiga tahun yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini. Data yang terbatas dalam penelitian ini tidak dapat menggambarkan situasi secara menyeluruh terhadap tingkat korupsi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Amruddin, Priyanda, R., & Agustina, T. S. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pradina Pustaka.
- Amyulianthy, R., Tejokusumo, I., Ekonomi dan Bisnis, F., & Pancasila, U. (2022). Audit Pemerintah Dan Indikasi Tindak Pidana Korupsi (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Pada Tahun 2014-2016). *Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 110–129.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2020). *Fraud 101: What Is Fraud?* Association of Certified Fraud Examiners.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2001). *UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2003). *UU No 17 Tahun 2003*. Badan Keuangan Daerah.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2004a). *UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. berdasarkan UU No 15 tahun 2004
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2004b). *UU Nomor 32 Tahun 2004*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *LHP LKPD*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Brickner, D. R., & Pearson, M. A. (2003). *SAS 99*. Fraud Magazine.
- Fuadi, I., & Maburur, A. (2021). Faktor-faktor penentu korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 317–328.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardani, Auliya, N. H., & Andriani, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu.
- Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. (2017). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2016). *E-Proceeding of Management*, 4(1), 20.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Laporan Akhir Tahun ICW 2022*. Indonesia Corruption Watch.
- Machado, M. R. R., & Gartner, I. R. (2018). A hipótese de Cressey (1953) e a investigação da ocorrência de fraudes corporativas: Uma análise empírica em instituições bancárias brasileiras. *Revista Contabilidade e Finanças*, 29(76), 60–81.
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5(1), 40–58.
- Naibaho, E. N. S., & Yunita, K. S. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini, Tindaklanjuti Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi Di Kementerian/Lembaga. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 6(1), 25–40.

- Ningsih, S. T. S. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11, 1–11.
- Nunu, I., Sondakh, J., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Berulang Atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kota Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 32–42.
- Nurfaidah, N., & Novita, N. (2022). Bagaimana Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI Dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia ? *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 259–269.
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2020) [Universitas Diponegoro].
- Perdana, A. I., & Prasetyo, T. J. (2023). Apakah Opini Audit, Pengendalian Internal, dan APBD Memengaruhi Tingkat Korupsi di Pemerintah Daerah. *JREA: Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 74–89.
- Pertiwi, A. R., & Haryanto. (2022). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Kerugian Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–8.
- Ridha, N. (2017). Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian. *Jurnal Hikmah*, 14(1).
- Shapiro, S.S. & Wilk, M.B. (1965). "An analysis of variance test for normality (complete samples)." *Biometrika*, 52(3-4), 591-611
- Supriyono. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. UGM Press.
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 20.
- Taboga, Marco (2021). "Gauss Markov theorem", Lectures on probability theory and mathematical statistics. Kindle Direct Publishin

- Verawaty, V. (2019). Pengaruh Bpk, Karakteristik Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Mbia*, 18(2), 79–99.
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, 6(1), 1016–1028.

